



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 172 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan integrasi dalam  
penyiapan dan pelaksanaan sistem pemerintahan  
berbasis elektronik yang terintegrasi pada Badan  
Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam 5 (lima)  
tahun, perlu ditetapkan peta rencana;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  
tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis  
Elektronik pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk  
Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang  
Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-  
Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024  
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6905);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
  9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
  10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  12. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Satu Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.
- KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk waktu 5 (lima) tahun dengan *baseline* tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Rencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat ketentuan mengenai:
- a. penerapan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- c. layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- d. infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- e. aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- f. keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
- g. audit teknologi informasi dan komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2026  
KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia  
dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi  
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 172 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PADA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) perlu melakukan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas proses bisnis, serta mendukung penyelenggaraan layanan jaminan produk halal yang cepat, mudah, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sebagai instansi yang menyelenggarakan layanan jaminan produk halal, BPJPH memerlukan sistem elektronik yang terintegrasi guna mendukung pelaksanaan layanan sertifikasi halal, pengawasan, pembinaan, pengelolaan data dan informasi, serta administrasi pemerintahan lainnya. Integrasi sistem dan layanan digital diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, penerapan SPBE pada BPJPH perlu dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan agar seluruh sistem, aplikasi, data, infrastruktur teknologi informasi, serta layanan digital dapat saling terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tanpa adanya perencanaan yang jelas dan terukur, pelaksanaan SPBE berpotensi berjalan secara parsial, tidak sinkron antar unit kerja, serta kurang optimal dalam mendukung efektivitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, BPJPH perlu menyusun Kebijakan Peta Rencana SPBE sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan, tahapan pelaksanaan, prioritas program, dan target pengembangan SPBE. Penyusunan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Strategis BPJPH Tahun 2025–2029, serta Arsitektur SPBE Nasional dalam rangka mempercepat transformasi digital menuju ekosistem layanan halal nasional yang efisien, terintegrasi, dan inklusif. Selain itu, penyusunan Peta Rencana SPBE bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kebijakan, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, keamanan sistem informasi, serta layanan digital pada BPJPH.

B. Maksud

Menyediakan arah kebijakan dan strategi pembangunan SPBE BPJPH yang selaras dengan RPJMN 2025-2029, Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) BPJPH 2025-2029.

C. Tujuan

1. Menjamin keterpaduan, keamanan, dan keberlanjutan transformasi digital layanan halal; dan
2. Mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal yang efektif, transparan, dan akuntabel.

D. Sasaran

Agar menjadi pedoman untuk setiap unit kerja pada BPJPH dalam rangka membuat rencana kegiatan tahunan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peta Rencana SPBE pada BPJPH meliputi seluruh kegiatan yaitu:

1. Arah kebijakan dan strategi implementasi peta rencana SPBE;
2. Peta rencana SPBE; dan
3. Indikator keberhasilan.

F. Pengertian

Beberapa istilah yang digunakan dalam Keputusan tentang Kebijakan Peta Rencana SPBE pada BPJPH memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
3. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
4. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
5. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
10. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
11. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

- terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, merepresentasikan suara, dan/atau bunyi yang keadaan sebenarnya menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
  13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
  14. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PETA RENCANA

Kebijakan ini mengatur penyusunan Peta Rencana SPBE BPJPH dengan muatan secara menyeluruh pada BPJPH, meliputi seluruh unit kerja pusat dan daerah yang menjalankan fungsi penyelenggaraan jaminan produk halal.

Kebijakan mengatur arah integrasi SPBE BPJPH dengan SPBE Kementerian Agama, instansi pusat, dan pemerintah daerah, terutama dalam mendukung keterpaduan layanan publik halal nasional dan internasional.

Kebijakan dilaksanakan melalui tinjauan dan telaah berkala terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan strategis, serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan atau optimalisasi muatan Peta Rencana SPBE BPJPH untuk menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.

#### A. Arah Kebijakan

1. Mempercepat transformasi layanan halal berbasis digital, meliputi:
  - a. mewujudkan layanan halal yang terintegrasi, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform digital seperti SIHALAL; dan
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti *AI*, *blockchain*, dan *big Data* untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keamanan proses sertifikasi halal.
2. Memperkuat Tata Kelola SPBE yang terintegrasi, meliputi:
  - a. menyelaraskan arsitektur SPBE BPJPH dengan Arsitektur SPBE Nasional dan Kementerian terkait; dan
  - b. menerapkan prinsip interoperabilitas, keamanan siber, dan tata kelola Data dalam setiap pengembangan sistem.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, meliputi:
  - a. membangun kompetensi digital ASN BPJPH melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karier berbasis teknologi; dan
  - b. memperkuat peran Pusat Data dan Informasi sebagai tulang punggung transformasi digital.
4. Memastikan keterpaduan layanan dengan pemangku kepentingan, meliputi:
  - a. melakukan integrasi sistem dengan Kementerian/Lembaga terkait,

- pemerintah daerah, serta lembaga halal internasional; dan
  - b. mengoptimalkan Halal Data *Center* sebagai pusat data nasional yang terhubung dengan sistem pemerintah.
5. Mendorong inovasi dan evaluasi berkelanjutan, meliputi:
- a. melakukan evaluasi berkala dan audit teknologi untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional dan perkembangan teknologi; dan
  - b. menerapkan sistem pemantauan *real-time* dan *dashboard* kinerja SPBE untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

## B. Strategi Implementasi

1. Tahun 2025: Fondasi digital dan penyusunan kebijakan
  - a. Kebijakan:
    - 1) menyusun dan merancang kebijakan Satu Data BPJPH;
    - 2) menetapkan Arsitektur SPBE BPJPH;
    - 3) menetapkan kebijakan Tata Kelola Data; dan
    - 4) menetapkan kebijakan keamanan informasi.
  - b. Strategi, meliputi:
    - 1) menyusun draft tim koordinasi SPBE BPJPH dan menyusun rancangan peta jalan digitalisasi;
    - 2) melakukan audit *baseline* SPBE dan kesiapan infrastruktur; dan
    - 3) mengembangkan SIHALAL dan Halal Data Center.
2. Tahun 2026: Integrasi Sistem dan Penguatan SDM
  - a. Kebijakan:
    - 1) menetapkan pelaksanaan SPBE pada BPJPH;
    - 2) menetapkan Arsitektur SPBE pada BPJPH;
    - 3) menetapkan Peta Rencana SPBE pada BPJPH;
    - 4) menetapkan tim koordinasi SPBE pada BPJPH;
    - 5) menetapkan pelaksanaan SPBE pada BPJPH;
    - 6) menetapkan pedoman audit internal teknologi dan informasi dan komunikasi pada BPJPH;
    - 7) menetapkan pedoman Layanan Jaringan Intra pada BPJPH;
    - 8) menetapkan pedoman Layanan Pusat Data pada BPJPH;
    - 9) menetapkan manajemen data dalam penyelenggaraan SPBE pada BPJPH;
    - 10) menetapkan pembangunan dan pengembangan Aplikasi dalam SPBE pada BPJPH;
    - 11) menetapkan sistem penghubung layanan pemerintah pada BPJPH;
    - 12) menetapkan kebijakan keamanan informasi dan teknologi informasi dan komunikasi pada BPJPH;
    - 13) menetapkan tim evaluator SPBE pada BPJPH; dan
    - 14) meningkatkan interoperabilitas sistem internal dan eksternal.
  - b. Strategi, meliputi:
    - 1) menetapkan tim koordinasi SPBE BPJPH dan peta jalan digitalisasi;
    - 2) integrasi SIHALAL dengan sistem yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, dan *stakeholder* yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal;
    - 3) pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital ASN BPJPH; dan
    - 4) implementasi sistem informasi manajemen BPJPH.

- 3. Tahun 2027: Penguatan keamanan dan interoperabilitas
  - a. Kebijakan  
Memastikan keamanan data dan sistem melalui sertifikasi dan audit.
  - b. Strategi, meliputi:
    - 1) penerapan ISO 27001 untuk keamanan informasi;
    - 2) instalasi modul keamanan oleh Badan Siber dan Sandi Negara; dan
    - 3) pengembangan *Smart Monitoring Halal Compliance System* berbasis AI.
- 4. Tahun 2028: Transformasi layanan *digital end-to-end*
  - a. Kebijakan  
Mencapai layanan halal digital yang lengkap dan terintegrasi.
  - b. Strategi, meliputi:
    - 1) implementasi penuh layanan halal *digital end-to-end*;
    - 2) harmonisasi standar halal dengan 10 (sepuluh) negara mitra (Organisasi Kerja Sama Islam) OKI; dan
    - 3) kampanye global Halal Indonesia di Asia dan Timur Tengah.
- 5. Tahun 2029: Evaluasi nasional dan konsolidasi SPBE
  - a. Kebijakan:  
Melakukan evaluasi menyeluruh dan integrasi dengan SPBE Nasional.
  - b. Strategi, meliputi:
    - 1) Audit kinerja SPBE dan evaluasi capaian RPJMN sektor halal;
    - 2) publikasi laporan kinerja Halal Indonesia 2029; dan
    - 3) integrasi penuh dengan SPBE Nasional dan Kementerian PANRB.

| Tahun | Fokus Strategis                                                                                               | Target Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unit Penanggung Jawab                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2025  | Menyusun dan merancang Arsitektur SPBE BPJPH, Kebijakan Tata Kelola Data, serta Kebijakan Keamanan Informasi. | Dokumen rancangan:<br>1. Kebijakan Satu Data BPJPH.<br>2. Pelaksanaan SPBE Pada BPJPH.<br>3. Arsitektur SPBE pada BPJPH.<br>4. Peta Rencana SPBE pada BPJPH.<br>5. Tim Koordinasi SPBE pada BPJPH.<br>6. Pedoman Audit Internal Teknologi dan Informasi dan Komunikasi pada BPJPH.<br>7. Pedoman Layanan Jaringan Intra pada BPJPH.<br>8. Pedoman Layanan Pusat Data pada BPJPH. | Sekretariat Utama dan Pusat Data dan Informasi |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>9. Manajemen Data Dalam Penyelenggaraan SPBE pada BPJPH.</div> <div>10. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi dalam SPBE pada BPJPH.</div> <div>11. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada BPJPH.</div> <div>12. Kebijakan Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada BPJPH.</div> <div>13. Tim Evaluator SPBE pada BPJPH.</div> |                          |
| 2026 | <div>1. Menetapkan kebijakan:</div> <div>a. Kebijakan Satu Data BPJPH.</div> <div>b. Pelaksanaan SPBE Pada BPJPH.</div> <div>c. Arsitektur SPBE pada BPJPH.</div> <div>d. Peta Rencana SPBE pada BPJPH.</div> <div>e. Tim Koordinasi SPBE pada BPJPH.</div> <div>f. Pedoman Audit Internal Teknologi dan Informasi dan Komunikasi pada BPJPH.</div> <div>g. Pedoman Layanan Jaringan Intra pada BPJPH.</div> <div>h. Pedoman Layanan Pusat Data pada BPJPH.</div> <div>i. Manajemen Data dalam penyelenggaraan SPBE pada BPJPH.</div> <div>j. Pembangunan dan</div> | <div>1. Menetapkan Kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan BPJPH.</div> <div>2. Aplikasi terintegrasi dan interoperabilitas awal dengan kementerian/lembaga , dan <i>stakeholder</i> yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal</div>                                                                                           | Pusat Data dan Informasi |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Pengembangan Aplikasi dalam SPBE pada BPJPH.</p> <p>k. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada BPJPH.</p> <p>l. Kebijakan Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada BPJPH.</p> <p>m. Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada BPJPH.</p> <p>2. Integrasi SIHALAL dengan sistem yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, dan stakeholder yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal</p> |                                                    |                                                                                                                                                          |
| 2027 | Penguatan keamanan informasi dan interoperabilitas eksternal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sistem keamanan dan pusat data tersertifikasi      | Pusat Data dan Informasi dan Inspektorat                                                                                                                 |
| 2028 | Transformasi layanan publik halal digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100% layanan utama BPJPH digital <i>end to end</i> | <p>1. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal</p> <p>2. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal</p> <p>3. Deputi Bidang Pembinaan dan</p> |

|      |                                            |                                           |                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                            |                                           | Pengawasan Jaminan Produk Halal<br>4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal |
| 2029 | Integrasi nasional dan evaluasi total SPBE | SPBE BPJPH terhubung dengan SPBE Nasional | Seluruh unit BPJPH                                                                                |

BAB III  
PETA RENCANA SPBE

1. Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;.
  - c. Layanan SPBE eksternal (layanan publik halal dan internal BPJPH);
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE, antara lain, yaitu:
    1. Aplikasi Publik SIHALAL ([ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id); [lembaga.halal.go.id](https://lembaga.halal.go.id); [bpjph.halal.go.id](https://bpjph.halal.go.id); [wave.halal.go.id](https://wave.halal.go.id); [trace.halal.go.id](https://trace.halal.go.id); [ppid.halal.go.id](https://ppid.halal.go.id); [jdih.halal.go.id](https://jdih.halal.go.id); [lms.halal.go.id](https://lms.halal.go.id); [siaga.halal.go.id](https://siaga.halal.go.id); [satudata.halal.go.id](https://satudata.halal.go.id); [halalmax.halal.go.id](https://halalmax.halal.go.id) ).
    2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BPJPH ([e-office.halal.go.id](https://e-office.halal.go.id); [blu.halal.go.id](https://blu.halal.go.id); [ekin.halal.go.id](https://ekin.halal.go.id); [presensi.halal.go.id](https://presensi.halal.go.id); [mail.halal.go.id](https://mail.halal.go.id); [studio.halal.go.id](https://studio.halal.go.id); [cmsbl.halal.go.id](https://cmsbl.halal.go.id)).
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.
2. Peta Rencana SPBE BPJPH dijadikan acuan utama, disusun berdasarkan RJPMN 2025-2029, Arsitektur SPBE Nasional, dan Renstra BPJPH 2025–2029, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dan disinkronkan oleh BPJPH dengan Kementerian PANRB.
3. Peta Rencana SPBE BPJPH disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan mengacu pada Arsitektur SPBE BPJPH dan Renstra BPJPH 2025–2029.
4. Jangka Waktu  
Peta Rencana SPBE BPJPH disusun untuk mendukung perencanaan arsitektur SPBE dalam periode 5 (lima) tahun. Tinjauan dilakukan setiap paruh waktu dan pada akhir periode, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kebijakan nasional dan perkembangan teknologi.
5. Tinjauan dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Nasional;
  - b. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - c. Peta Rencana SPBE Nasional;
  - d. rencana Kerja Pemerintah Pusat; dan
  - e. hasil evaluasi SPBE internal BPJPH.

BAB IV  
INDIKATOR KEBERHASILAN

| No. | Aspek SPBE                  | Indikator Keberhasilan (Target 2029)                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Layanan digital             | 100% layanan utama BPJPH tersedia dalam bentuk digital pada tahun 2029                                                                                            |
| 2   | Integrasi sistem            | 100% integrasi layanan BPJPH dengan SPBE Nasional dan Kementerian/Lembaga, serta stakeholder yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal |
| 3   | Keamanan Data               | BPJPH memperoleh sertifikasi ISO 27001 dan tidak terdapat insiden siber mayor                                                                                     |
| 4   | Sumber daya manusia digital | 100% ASN BPJPH yang diberikan tugas pengelolaan aplikasi SPBE BPJPH terlatih dan/atau tersertifikasi dalam kompetensi digital pemerintahan                        |
| 5   | Kepuasan layanan publik     | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan halal digital mencapai $\geq 90\%$                                                                                    |

BAB V  
PENUTUP

Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan pembangunan SPBE BPJPH 2025–2029 dan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam mewujudkan layanan publik halal dan pengelolaan internal bisnis proses BPJPH berbasis *digital*. Dokumen ini akan ditinjau kembali setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kebijakan nasional.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia  
dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 172 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unit Penanggung Jawab | Baseline                   | Target |      |      |      |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------|------|------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 2025                       | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1.  | Tata Kelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            |        |      |      |      |  |
|     | A. Kebijakan penyelenggaraan SPBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                            |        |      |      |      |  |
|     | 1) Menyusun dan menetapkan Kebijakan tentang:<br>a. Pelaksanaan SPBE Pada BPJPH;<br>b. Tim koordinasi SPBE pada BPJPH;<br>c. Kebijakan keamanan informasi dan teknologi informasi dan komunikasi BPJPH;<br>d. Pedoman audit internal teknologi dan informasi dan komunikasi pada BPJPH;<br>e. Pedoman layanan jaringan intra pada BPJPH; |                       | 12 Dokumen yang ditetapkan |        |      |      |      |  |

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unit Penanggung Jawab                                  | Baseline                  | Target                 |                         |                         |                         |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | 2025                      | 2026                   | 2027                    | 2028                    | 2029                    |  |
|     | f. Pedoman layanan Pusat Data pada BPJPH;<br>g. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dalam SPBE pada BPJPH;<br>h. Sistem penghubung layanan pemerintah pada BPJPH;<br>i. Tim evaluator SPBE pada BPJPH;<br>j. Manajemen Data dalam Penyelenggaraan SPBE pada BPJPH;<br>k. Arsitektur SPBE pada BPJPH; dan<br>l. Peta Rencana SPBE Pada BPJPH. |                                                        |                           |                        |                         |                         |                         |  |
|     | 2) Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan SPBE BPJPH                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas |                           | Kegiatan sosialisasi 1 | Kegiatan sosialisasi 2  | Kegiatan sosialisasi 3  | Kegiatan sosialisasi 4  |  |
|     | 3) Tinjauan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan SPBE BPJPH                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Biro Perencanaan dan Organisasi dan/atau Inspektorat   |                           |                        | Tinjauan dan evaluasi 1 | Tinjauan dan evaluasi 2 | Tinjauan dan evaluasi 3 |  |
|     | B. Kebijakan Tata Kelola Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                           |                        |                         |                         |                         |  |
|     | 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan Tata Kelola Data                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan       | 1 Dokumen yang ditetapkan |                        |                         |                         |                         |  |

| No. | Kegiatan                                                                 | Unit Penanggung Jawab                                  | Baseline                  | Target                 |                         |                         |                         |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|     |                                                                          |                                                        | 2025                      | 2026                   | 2027                    | 2028                    | 2029                    |  |
|     |                                                                          | Humas                                                  |                           |                        |                         |                         |                         |  |
|     | 2) Sosialisasi kebijakan Tata Kelola Data pada BPJPH                     | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas |                           | Kegiatan sosialisasi 1 | Kegiatan sosialisasi 2  | Kegiatan sosialisasi 3  | Kegiatan sosialisasi 4  |  |
|     | 3) Tinjauan dan evaluasi kebijakan Tata Kelola Data pada BPJPH           | Biro Perencanaan dan Organisasi dan/atau Inspektorat   |                           |                        | Tinjauan dan evaluasi 1 | Tinjauan dan evaluasi 2 | Tinjauan dan evaluasi 3 |  |
|     | C. Kebijakan Keamanan Informasi dan TIK                                  |                                                        |                           |                        |                         |                         |                         |  |
|     | 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan keamanan informasi dan TIK          | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas | 1 Dokumen yang ditetapkan |                        |                         |                         |                         |  |
|     | 2) Sosialisasi kebijakan keamanan informasi dan TIK pada BPJPH           | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas |                           | Kegiatan sosialisasi 1 | Kegiatan sosialisasi 2  | Kegiatan sosialisas 3   | Kegiatan sosialisasi 4  |  |
|     | 3) Tinjauan dan evaluasi kebijakan keamanan informasi dan TIK pada BPJPH | Biro Perencanaan dan Organisasi dan/atau Inspektorat   |                           |                        | Tinjauan dan evaluasi 1 | Tinjauan dan evaluasi 2 | Tinjauan dan evaluasi 3 |  |

| No. | Kegiatan                                                           | Unit Penanggung Jawab                                  | Baseline                  | Target                 |                         |                         |                         |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|     |                                                                    |                                                        | 2025                      | 2026                   | 2027                    | 2028                    | 2029                    |  |
|     | D. Kebijakan Arsitektur SPBE                                       |                                                        |                           |                        |                         |                         |                         |  |
|     | 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan Arsitektur SPBE pada BPJPH.   | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas | 1 dokumen yang ditetapkan |                        |                         |                         |                         |  |
|     | 2) Sosialisasi kebijakan Arsitektur SPBE pada BPJPH                | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas |                           | Kegiatan sosialisasi 1 | Kegiatan sosialisasi 2  | Kegiatan sosialisas 3   | Kegiatan sosialisasi 4  |  |
|     | 3) Tinjauan dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE pada BPJPH      | Biro Perencanaan dan Organisasi dan/atau Inspektorat   |                           |                        | Tinjauan dan evaluasi 1 | Tinjauan dan evaluasi 2 | Tinjauan dan evaluasi 3 |  |
|     | E. Kebijakan Peta Rencana SPBE                                     |                                                        |                           |                        |                         |                         |                         |  |
|     | 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan Peta Rencana SPBE pada BPJPH. | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas | 1 dokumen yang ditetapkan |                        |                         |                         |                         |  |
|     | 2) Sosialisasi kebijakan Peta Rencana SPBE pada BPJPH              | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas |                           | Kegiatan sosialisasi 1 | Kegiatan sosialisasi 2  | Kegiatan sosialisasi 3  | Kegiatan sosialisasi 4  |  |
|     | 3) Tinjauan dan evaluasi kebijakan Peta Rencana SPBE               | Biro Perencanaan dan Organisasi                        |                           |                        | Tinjauan dan evaluasi 1 | Tinjauan dan evaluasi 2 | Tinjauan dan evaluasi 3 |  |

| No. | Kegiatan                                                                   | Unit Penanggung Jawab                                                | Baseline                  | Target                 |                         |                         |                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                                                            |                                                                      | 2025                      | 2026                   | 2027                    | 2028                    | 2029                    |
|     | pada BPJPH                                                                 | dan/atau Inspektorat                                                 |                           |                        |                         |                         |                         |
| 2.  | Manajemen                                                                  |                                                                      |                           |                        |                         |                         |                         |
|     | A. Manajemen risiko SPBE                                                   |                                                                      |                           |                        |                         |                         |                         |
|     | 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang manajemen risiko pada BPJPH   | Pusat Data dan Informasi, Biro Hukum, SDM dan Humas, dan Inspektorat | 1 dokumen yang ditetapkan |                        |                         |                         |                         |
|     | 2) Sosialisasi kebijakan manajemen risiko SPBE pada BPJPH                  | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas               |                           | Kegiatan sosialisasi 1 | Kegiatan sosialisasi 2  | Kegiatan sosialisasi 3  | Kegiatan sosialisasi 4  |
|     | 3) Tinjauan dan evaluasi kebijakan manajemen risiko pada BPJPH             | Inspektorat                                                          |                           |                        | Tinjauan dan evaluasi 1 | Tinjauan dan evaluasi 2 | Tinjauan dan evaluasi 3 |
|     | B. Manajemen keamanan informasi dan TIK                                    |                                                                      |                           |                        |                         |                         |                         |
|     | 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan keamanan informasi dan TIK pada BPJPH | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas               | 1 dokumen yang ditetapkan |                        |                         |                         |                         |
|     | 2) Sosialisasi kebijakan keamanan informasi dan TIK BPJPH                  | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas               |                           | Kegiatan sosialisasi 1 | Kegiatan sosialisasi 2  | Kegiatan sosialisasi 3  | Kegiatan sosialisasi 4  |

| No. | Kegiatan                                                                                      | Unit Penanggung Jawab                                                   | Baseline                    | Target                         |                         |                                |                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                               |                                                                         | 2025                        | 2026                           | 2027                    | 2028                           | 2029                    |
|     | 3) Pembentukan dan implementasi <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT) BPJPH | Pusat Data dan Informasi                                                | 1 Dokumen                   | Tindak lanjut hasil tinjauan 1 |                         | Tindak lanjut hasil tinjauan 2 |                         |
|     | 4) Tinjauan dan evaluasi kebijakan keamanan informasi dan TIK pada BPJPH                      | Pusat Data dan Informasi, Inspektorat, dan Badan Sandi dan Siber Negara |                             |                                | Tinjauan dan evaluasi 1 | Tinjauan dan evaluasi 2        | Tinjauan dan evaluasi 3 |
|     | C. Manajemen Data                                                                             |                                                                         |                             |                                |                         |                                |                         |
|     | 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen Data dalam penyelenggaraan SPBE pada BPJPH.    | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas                  | 1 dokumen yang ditetapkan   |                                |                         |                                |                         |
|     | 2) Sosialisasi kebijakan manajemen Data pada BPJPH                                            | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas                  |                             | Kegiatan sosialisasi 1         | Kegiatan sosialisasi 2  | Kegiatan sosialisasi 3         | Kegiatan sosialisasi 4  |
|     | 3) Tinjauan dan evaluasi kebijakan manajemen Data pada BPJPH                                  | Pusat Data dan Informasi dan/atau Inspektorat                           |                             |                                | Tinjauan dan evaluasi 1 | Tinjauan dan evaluasi 2        | Tinjauan dan evaluasi 3 |
|     | D. Manajemen aset TIK                                                                         |                                                                         |                             |                                |                         |                                |                         |
|     | 1) Inventaris aset TIK                                                                        | Pusat Data dan Informasi dan Biro Umum dan Keuangan                     | Dokumen inventaris aset TIK |                                |                         |                                |                         |

| No. | Kegiatan                                                                     | Unit Penanggung Jawab                                       | Baseline       | Target                                       |                         |                                              |                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                              |                                                             | 2025           | 2026                                         | 2027                    | 2028                                         | 2029                    |
|     | 2) Sosialisasi kebijakan manajemen aset TIK pada BPJPH                       | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM dan Humas      |                | Kegiatan sosialisasi 1                       | Kegiatan sosialisasi 2  | Kegiatan sosialisasi 3                       | Kegiatan sosialisasi 4  |
|     | 3) Tinjauan dan evaluasi kebijakan manajemen aset TIK pada BPJPH             | Biro Umum dan Keuangan dan/atau inspektorat                 |                |                                              | Tinjauan dan evaluasi 1 | Tinjauan dan evaluasi 2                      | Tinjauan dan evaluasi 3 |
|     | E. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)                                       |                                                             |                |                                              |                         |                                              |                         |
|     | 1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK pada BPJPH | Biro Perencanaan dan Organisasi                             |                | Analisis jabatan dan analisis beban kerja 1  |                         | Analisis jabatan dan analisis beban kerja 2  |                         |
|     | 2) Peta jabatan di bidang TIK pada BPJPH                                     | Biro Perencanaan dan Organisasi                             | Peta jabatan 1 |                                              | Peta jabatan 2          |                                              | Peta jabatan 3          |
|     | 3) Pemetaan kompetensi SDM TIK pada BPJPH                                    | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal |                | Peta kompetensi 1                            |                         | Peta kompetensi 2                            |                         |
|     | 4) Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi SDM TIK pada BPJPH             | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal |                | Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi 1 |                         | Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi 2 |                         |
|     | 5) Rencana pengembangan kompetensi SDM TIK pada                              | Pusat Pengembangan                                          |                | Rencana pengembangan                         | Rencana pengembangan    | Rencana pengembangan                         | Rencana pengembangan    |

| No. | Kegiatan                                                     | Unit Penanggung Jawab                                                                     | Baseline | Target                                |                                       |                                       |                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                                              |                                                                                           | 2025     | 2026                                  | 2027                                  | 2028                                  | 2029                                  |
|     | BPJPH                                                        | Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal                                                  |          | kompetensi 1                          | kompetensi 2                          | kompetensi 3                          | kompetensi 4                          |
|     | 6) Pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK pada BPJPH    | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal                               |          | Pelaksanaan pengembangan kompetensi 1 | Pelaksanaan pengembangan kompetensi 2 | Pelaksanaan pengembangan kompetensi 3 | Pelaksanaan pengembangan kompetensi 4 |
|     | 7) Evaluasi pengembangan kompetensi SDM TIK pada BPJPH       | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal dan Biro Hukum, SDM dan Humas |          | Evaluasi pengembangan kompetensi 1    | Evaluasi pengembangan kompetensi 2    | Evaluasi Pengembangan Kompetensi 3    | Evaluasi pengembangan kompetensi 4    |
|     | F. Manajemen Pengetahuan                                     |                                                                                           |          |                                       |                                       |                                       |                                       |
|     | 1) Rencana pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE pada BPJPH | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal                               |          | 1 dokumen rencana                     | Tindak lanjut hasil tinjauan 1        | Tindak lanjut hasil tinjauan 2        | Tindak lanjut hasil tinjauan 3        |
|     | 2) Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE pada BPJPH         | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal                               |          | Kegiatan manajemen pengetahuan 1      | Kegiatan manajemen pengetahuan 2      | Kegiatan manajemen pengetahuan 3      | Kegiatan manajemen pengetahuan 4      |
|     | 3) Evaluasi pelaksanaan manajemen pengetahuan                | Biro Perencanaan dan Organisasi                                                           |          | Tinjauan dan evaluasi 1               | Tinjauan dan evaluasi 2               | Tinjauan dan evaluasi 3               | Tinjauan dan evaluasi 4               |

| No. | Kegiatan                                                                                 | Unit Penanggung Jawab           | Baseline          | Target                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                 | 2025              | 2026                                                                                | 2027                                                                                | 2028                                                                                | 2029                                                                                |
|     | SPBE pada BPJPH                                                                          | dan/atau Inspektorat            |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|     | G. Manajemen Perubahan                                                                   |                                 |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|     | 1) Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE pada BPJPH                                    | Pusat Data dan Informasi        |                   | 2 Dokumen SOP                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|     | 2) Rencana perubahan pada Aplikasi di BPJPH                                              | Pusat Data dan Informasi        | 2 dokumen rencana |                                                                                     | Tindak lanjut hasil tinjauan 1                                                      | Tindak lanjut hasil tinjauan 2                                                      | Tindak lanjut hasil tinjauan 3                                                      |
|     | 3) Pelaksanaan perubahan pada Aplikasi BPJPH                                             | Pusat Data dan Informasi        |                   | Pelaksanaan perubahan 1                                                             | Pelaksanaan perubahan 2                                                             | Pelaksanaan perubahan 3                                                             | Pelaksanaan perubahan 4                                                             |
|     | 4) Evaluasi perubahan pada Aplikasi BPJPH                                                | Pusat Data dan Informasi        |                   | Tinjauan dan evaluasi 1                                                             | Tinjauan dan evaluasi 2                                                             | Tinjauan dan evaluasi 3                                                             | Tinjauan dan evaluasi 4                                                             |
|     | H. Manajemen Layanan                                                                     |                                 |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|     | 1) Penyusunan SOP manajemen layanan SPBE pada BPJPH                                      | Biro Perencanaan dan Organisasi |                   | 4 Dokumen SOP                                                                       | Tindak lanjut hasil tinjauan 1                                                      | Tindak lanjut hasil tinjauan 2                                                      | Tindak lanjut hasil tinjauan 3                                                      |
|     | 2) Pembentukan tim pelaksana untuk menindaklanjuti pengaduan terhadap Layanan pada BPJPH | Biro Perencanaan dan Organisasi |                   | Keputusan tim pelaksana untuk menindaklanjuti pengaduan terhadap Layanan pada BPJPH | Keputusan tim pelaksana untuk menindaklanjuti pengaduan terhadap Layanan pada BPJPH | Keputusan tim pelaksana untuk menindaklanjuti pengaduan terhadap Layanan pada BPJPH | Keputusan tim pelaksana untuk menindaklanjuti pengaduan terhadap Layanan pada BPJPH |

| No. | Kegiatan                                                             | Unit Penanggung Jawab                                     | Baseline                                    | Target                                      |                                             |                                             |                                             |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|     |                                                                      |                                                           | 2025                                        | 2026                                        | 2027                                        | 2028                                        | 2029                                        |  |
|     | 3) Pelaksanaan manajemen layanan SPBE oleh tim pelaksana pada BPJPH  | Pusat Data dan Informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                             | Pelaksanaan manajemen layanan 1             | Pelaksanaan manajemen layanan 2             | Pelaksanaan manajemen layanan 3             | Pelaksanaan manajemen layanan 4             |  |
|     | 4) Pengembangan manajemen layanan SPBE oleh tim pelaksana pada BPJPH | Pusat Data dan Informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                             | Pengembangan manajemen layanan 1            | Pengembangan manajemen layanan 2            | Pengembangan manajemen layanan 3            | Pengembangan manajemen layanan 4            |  |
|     | 5) Evaluasi pelaksanaan manajemen layanan SPBE pada BPJPH            | Inspektorat                                               |                                             | Tinjauan dan evaluasi 1                     | Tinjauan dan evaluasi 2                     | Tinjauan dan evaluasi 3                     | Tinjauan dan evaluasi 4                     |  |
| 3.  | Layanan                                                              |                                                           |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |  |
|     | A. Layanan Sertifikasi Halal                                         |                                                           |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |  |
|     | 1) Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL                         | Pusat Data dan Informasi                                  | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 1 | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 2 | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 3 | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 4 | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 5 |  |
|     | 2) Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL                         | Pusat Data dan Informasi                                  | Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 1 | Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 2 | Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 3 | Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 4 | Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 5 |  |
|     | 3) Operasional Aplikasi SIHALAL                                      | Pusat Data dan Informasi                                  | Operasional Aplikasi SIHALAL 1              | Operasional Aplikasi SIHALAL 2              | Operasional Aplikasi SIHALAL 3              | Operasional Aplikasi SIHALAL 4              | Operasional Aplikasi SIHALAL 5              |  |

| No. | Kegiatan                                                              | Unit Penanggung Jawab                                       | Baseline                                                             | Target                                                               |                                                                      |                                                                      |                                                                      |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                       |                                                             | 2025                                                                 | 2026                                                                 | 2027                                                                 | 2028                                                                 | 2029                                                                 |  |
|     | 4) Evaluasi pelaksanaan pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL | Inspektorat                                                 | Evaluasi pelaksanaan pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL 1 | Evaluasi pelaksanaan pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL 2 | Evaluasi pelaksanaan pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL 3 | Evaluasi pelaksanaan pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL 4 | Evaluasi pelaksanaan pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL 5 |  |
|     | B. Layanan pembinaan dan pengawasan Produk Halal                      |                                                             |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |  |
|     | 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal          | Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal | Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal 1          | Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal 2          | Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal 3          | Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal 4          | Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal 5          |  |
|     | 2) Pengembangan layanan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal | Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal | Pengembangan layanan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal 1 | Pengembangan layanan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal 2 | Pengembangan layanan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal 3 | Pengembangan layanan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal 4 | Pengembangan layanan pembinaan dan pengawasan Jaminan Produk Halal 5 |  |
|     | 3) Evaluasi layanan pembinaan dan pengawasan produk halal             | Inspektorat                                                 | Evaluasi layanan pembinaan dan pengawasan produk halal 1             | Evaluasi layanan pembinaan dan pengawasan produk halal 2             | Evaluasi layanan pembinaan dan pengawasan produk halal 3             | Evaluasi layanan pembinaan dan pengawasan produk halal 4             | Evaluasi layanan pembinaan dan pengawasan produk halal 5             |  |
|     | 4) Tinjauan dan evaluasi pedoman manajemen                            | Pusat Data dan Informasi,                                   |                                                                      | Tinjauan dan evaluasi 1                                              | Tinjauan dan evaluasi 2                                              | Tinjauan dan evaluasi 3                                              | Tinjauan dan evaluasi 4                                              |  |

| No. | Kegiatan                                               | Unit Penanggung Jawab                                       | Baseline                            | Target                              |                                     |                                     |                                     |  |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|     |                                                        |                                                             | 2025                                | 2026                                | 2027                                | 2028                                | 2029                                |  |
|     | keamanan informasi dan TIK pada BPJPH                  | dan/atau Inspektorat                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|     | 5) Pembentukan dan Implementasi CISRT-BPJPH            | Pusat Data dan Informasi                                    | 1 Dokumen                           | Tindak lanjut hasil tinjauan1       |                                     | Tindak Lanjut Hasil Tinjauan 2      |                                     |  |
|     | 6) Monitoring dan evaluasi Keamanan Siber              | Inspektorat dan Badan Sandi dan Siber Negara                | Kegiatan monev 1                    | Kegiatan monev 2                    | Kegiatan monev 3                    | Kegiatan monev 4                    | Kegiatan monev 5                    |  |
|     | C. Layanan pendidikan dan pelatihan halal              |                                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|     | 1) Pelaksanaan layanan pendidikan dan pelatihan halal  | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal | Pelaksanaan layanan diklat halal 1  | Pelaksanaan layanan diklat halal 2  | Pelaksanaan layanan diklat halal 3  | Pelaksanaan layanan diklat halal 4  | Pelaksanaan layanan diklat halal 5  |  |
|     | 2) Pengembangan layanan pendidikan dan pelatihan halal | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal | pengembangan layanan diklat halal 1 | pengembangan layanan diklat halal 2 | pengembangan layanan diklat halal 3 | pengembangan layanan diklat halal 4 | pengembangan layanan diklat halal 5 |  |
|     | 3) Evaluasi layanan pendidikan dan pelatihan halal     | Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal       | Evaluasi layanan diklat halal 1     | Evaluasi layanan diklat halal 2     | Evaluasi layanan diklat halal 3     | Evaluasi layanan diklat halal 4     | Evaluasi layanan diklat halal 5     |  |
|     | D. Layanan audit                                       |                                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|     | 1) Pelaksanaan layanan audit                           | Inspektorat                                                 | Pelaksanaan                         | Pelaksanaan                         | Pelaksanaan                         | Pelaksanaan layanan                 | Pelaksanaan layanan                 |  |

| No. | Kegiatan                                 | Unit Penanggung Jawab           | Baseline                           | Target                             |                                    |                                    |                                    |  |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|     |                                          |                                 | 2025                               | 2026                               | 2027                               | 2028                               | 2029                               |  |
|     |                                          |                                 | layanan audit 1                    | layanan audit 2                    | layanan audit 3                    | audit 4                            | audit 5                            |  |
|     | 2) Pengembangan layanan audit            | Inspektorat                     | Pengembangan layanan audit 1       | Pengembangan layanan audit 2       | Pengembangan layanan audit 3       | Pengembangan layanan audit 4       | Pengembangan layanan audit 5       |  |
|     | 3) Evaluasi layanan audit                | Biro Perencanaan dan Organisasi | Evaluasi layanan audit 1           | Evaluasi layanan audit 2           | Evaluasi layanan audit 3           | Evaluasi layanan audit 4           | Evaluasi layanan audit 5           |  |
|     | E. Layanan kepegawaian                   |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |  |
|     | 1) Pelaksanaan layanan kepegawaian       | Biro Hukum, SDM dan Humas       | Pelaksanaan layanan kepegawaian 1  | Pelaksanaan layanan kepegawaian 2  | Pelaksanaan layanan kepegawaian 3  | Pelaksanaan layanan kepegawaian 4  | Pelaksanaan Layanan Kepegawaian 5  |  |
|     | 2) Pengembangan layanan kepegawaian      | Biro Hukum, SDM dan Humas       | Pengembangan layanan kepegawaian 1 | Pengembangan layanan kepegawaian 2 | Pengembangan layanan kepegawaian 3 | Pengembangan layanan kepegawaian 4 | Pengembangan layanan kepegawaian 5 |  |
|     | 3) Evaluasi layanan kepegawaian          | Biro Hukum, SDM dan Humas       | Evaluasi layanan kepegawaian 1     | Evaluasi layanan kepegawaian 2     | Evaluasi layanan kepegawaian 3     | Evaluasi layanan kepegawaian 4     | Evaluasi layanan kepegawaian 5     |  |
|     | F. Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |  |
|     | 1) Pelaksanaan layanan TTE               | Pusat Data dan Informasi        | Pelaksanaan layanan TTE 1          | Pelaksanaan layanan TTE 2          | Pelaksanaan layanan TTE 3          | Pelaksanaan layanan TTE 4          | Pelaksanaan layanan TTE 5          |  |
|     | 2) Pengembangan layanan TTE              | Pusat Data dan Informasi        | Pengembangan layanan TTE 1         | Pengembangan layanan TTE 2         | Pengembangan layanan TTE 3         | Pengembangan layanan TTE 4         | Pengembangan layanan TTE 5         |  |
|     | 3) Evaluasi layanan TTE                  | Pusat Data                      | Evaluasi                           | Evaluasi layanan                   | Evaluasi layanan                   | Evaluasi                           | Evaluasi                           |  |

| No. | Kegiatan                                            | Unit Penanggung Jawab    | Baseline                                           | Target                                             |                                                    |                                                    |                                                    |  |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
|     |                                                     |                          | 2025                                               | 2026                                               | 2027                                               | 2028                                               | 2029                                               |  |
|     |                                                     | dan Informasi            | layanan TTE 1                                      | TTE 2                                              | TTE 3                                              | layanan TTE 4                                      | layanan TTE 5                                      |  |
|     | G. Layanan permohonan dan gangguan TIK              |                          |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |  |
|     | 1) Pelaksanaan layanan permohonan dan gangguan TIK  | Pusat Data dan Informasi | Pelaksanaan layanan permohonan dan gangguan TIK 1  | Pelaksanaan layanan permohonan dan gangguan TIK 2  | Pelaksanaan layanan permohonan dan gangguan TIK 3  | Pelaksanaan layanan permohonan dan gangguan TIK 4  | Pelaksanaan layanan permohonan dan gangguan TIK 5  |  |
|     | 2) Pengembangan layanan permohonan dan gangguan TIK | Pusat Data dan Informasi | Pengembangan layanan permohonan dan gangguan TIK 1 | Pengembangan layanan permohonan dan gangguan TIK 2 | Pengembangan layanan permohonan dan gangguan TIK 3 | Pengembangan layanan permohonan dan gangguan TIK 4 | Pengembangan layanan permohonan dan gangguan TIK 5 |  |
|     | 3) Evaluasi layanan permohonan dan gangguan TIK     | Pusat Data dan Informasi | Evaluasi layanan permohonan dan gangguan TIK 1     | Evaluasi layanan permohonan dan gangguan TIK 2     | Evaluasi layanan permohonan dan gangguan TIK 3     | Evaluasi layanan permohonan dan gangguan TIK 4     | Evaluasi layanan permohonan dan gangguan TIK 5     |  |
| 4.  | Aplikasi                                            |                          |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |  |
|     | A. Aplikasi SIHALAL                                 |                          |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |  |
|     | 1) Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL        | Pusat Data dan Informasi | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 1        | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 2        | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 3        | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 4        | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL 5        |  |
|     | 2) Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIHALAL        | Pusat Data dan Informasi | Pelaksanaan pengembangan                           | Pelaksanaan pengembangan                           | Pelaksanaan pengembangan                           | Pelaksanaan pengembangan                           | Pelaksanaan pengembangan                           |  |

| No. | Kegiatan                                                              | Unit Penanggung Jawab                                   | Baseline                                                 | Target                                                   |                                                          |                                                          |                                                          |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                       |                                                         | 2025                                                     | 2026                                                     | 2027                                                     | 2028                                                     | 2029                                                     |  |
|     |                                                                       |                                                         | Aplikasi SIHALAL 1                                       | Aplikasi SIHALAL 2                                       | Aplikasi SIHALAL 3                                       | Aplikasi SIHALAL 4                                       | Aplikasi SIHALAL 5                                       |  |
|     | 3) Operasional Aplikasi SIHALAL                                       | Pusat Data dan Informasi                                | Operasional Aplikasi SIHALAL 1                           | Operasional Aplikasi SIHALAL 2                           | Operasional Aplikasi SIHALAL 3                           | Operasional Aplikasi SIHALAL 4                           | Operasional Aplikasi SIHALAL 5                           |  |
|     | 4) Evaluasi pelaksanaan pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL | Pusat Data dan Informasi                                | Evaluasi pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL 1 | Evaluasi pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL 2 | Evaluasi pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL 3 | Evaluasi pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL 4 | Evaluasi pengembangan dan operasional Aplikasi SIHALAL 5 |  |
|     | B. Aplikasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) BPJPH                    |                                                         |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |  |
|     | 1) Perencanaan pengembangan Aplikasi SIM BPJPH                        | Pusat Data dan Informasi                                | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIM BPJPH 1            | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIM BPJPH 2            | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIM BPJPH 3            | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIM BPJPH 4            | Perencanaan pengembangan Aplikasi SIM BPJPH-5            |  |
|     | 2) Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIM BPJPH                        | Pusat Data dan Informasi                                | Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIM BPJPH 1            | Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIM BPJPH 2            | Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIM BPJPH 3            | Pelaksanaan pengembangan Aplikasi SIM BPJPH 4            | Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SIM BPJPH-5            |  |
|     | 3) Operasional Aplikasi SIM BPJPH                                     | Pusat Data dan Informasi dan Biro Hukum, SDM, dan Hukum | Operasional Aplikasi SIM BPJPH 1                         | Operasional Aplikasi SIM BPJPH 2                         | Operasional Aplikasi SIM BPJPH 3                         | Operasional Aplikasi SIM BPJPH 4                         | Operasional Aplikasi SIM BPJPH 5                         |  |
|     | 4) Evaluasi pelaksanaan pengembangan dan operasional Aplikasi SIM     | Pusat Data dan Informasi                                | Evaluasi pengembangan dan                                | Evaluasi pengembangan dan operasional                    | Evaluasi pengembangan dan operasional                    | Evaluasi pengembangan dan operasional Aplikasi           | Evaluasi pengembangan dan operasional Aplikasi           |  |

| No. | Kegiatan                                                 | Unit Penanggung Jawab    | Baseline                         | Target                                         |                                                |                                                |                                                |  |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|     |                                                          |                          | 2025                             | 2026                                           | 2027                                           | 2028                                           | 2029                                           |  |
|     | BPJPH                                                    |                          | operasional Aplikasi SIM BPJPH 1 | Aplikasi SIM BPJPH 2                           | Aplikasi SIM BPJPH 3                           | SIM BPJPH 4                                    | SIM BPJPH 5                                    |  |
| 5.  | Infrastruktur                                            |                          |                                  |                                                |                                                |                                                |                                                |  |
|     | A. Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN)                 |                          |                                  |                                                |                                                |                                                |                                                |  |
|     | 1) Penyusunan SOP permohonan hosting pemanfaatan PDN     | Pusat Data dan Informasi |                                  | 1 dokumen SOP                                  | Tindak lanjut hasil tinjauan 1                 | Tindak lanjut hasil tinjauan 2                 | Tindak lanjut hasil tinjauan 3                 |  |
|     | 2) Pelaksanaan proses permohonan hosting pemanfaatan PDN | Pusat Data dan Informasi |                                  | Pelaksanaan permohonan pemanfaatan PDN BPJPH 1 | Pelaksanaan permohonan pemanfaatan PDN BPJPH 2 | Pelaksanaan permohonan pemanfaatan PDN BPJPH 3 | Pelaksanaan permohonan pemanfaatan PDN BPJPH 4 |  |
|     | 3) Pemanfaatan hosting pada PDN                          | Pusat Data dan Informasi |                                  | Pelaksanaan pemanfaatan PDN BPJPH 1            | Pelaksanaan pemanfaatan PPDN BPJPH 2           | Pelaksanaan pemanfaatan PDN BPJPH 3            | Pelaksanaan pemanfaatan PDN BPJPH 4            |  |
|     | 4) Monitoring dan evaluasi hosting pemanfaatan PDN       | Pusat Data dan Informasi |                                  | Monev pemanfaatan PDN BPJPH 1                  | Monev pemanfaatan PDN BPJPH 2                  | Monev pemanfaatan PDN BPJPH 3                  | Monev pemanfaatan PDN BPJPH 4                  |  |
|     | B. Pusat komputasi awan BPJPH                            |                          |                                  |                                                |                                                |                                                |                                                |  |
|     | 1) Perencanaan pusat komputasi awan BPJPH                | Pusat Data dan Informasi |                                  | 1 dokumen perencanaan pusat komputasi          | Tindak lanjut hasil tinjauan 1                 | Tindak lanjut hasil tinjauan 2                 | Tindak lanjut hasil tinjauan 3                 |  |
|     | 2) Pemanfaatan pusat komputasi awan BPJPH                | Pusat Data dan Informasi |                                  | Pelaksanaan pemanfaatan PDN BPJPH 1            | Pelaksanaan Pemanfaatan PDN BPJPH 2            | Pelaksanaan Pemanfaatan PDN BPJPH 3            | Pelaksanaan Pemanfaatan PDN BPJPH 4            |  |

| No. | Kegiatan                                                        | Unit Penanggung Jawab    | Baseline | Target                                          |                                               |                                               |                                               |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|     |                                                                 |                          | 2025     | 2026                                            | 2027                                          | 2028                                          | 2029                                          |  |
|     | 3) Monitoring dan evaluasi pusat komputasi awan                 | Pusat Data dan Informasi |          | Monev Pemanfaatan PDN BPJPH 1                   | Monev Pemanfaatan PDN BPJPH 2                 | Monev Pemanfaatan PDN BPJPH 3                 | Monev Pemanfaatan PDN BPJPH 4                 |  |
|     | C. Jaringan Intra Pemerintah                                    |                          |          |                                                 |                                               |                                               |                                               |  |
|     | 1) Rencana pelaksanaan jaringan intra pemerintah pada BPJPH     | Pusat Data dan Informasi |          | 1 dokumen perencanaan jaringan intra pemerintah | Tindak lanjut hasil tinjauan 1                | Tindak lanjut hasil tinjauan 2                | Tindak lanjut hasil tinjauan 3                |  |
|     | 2) Pelaksanaan jaringan intra pemerintah pada BPJPH             | Pusat Data dan Informasi |          | Pelaksanaan jaringan intra pemerintah BPJPH 1   | Pelaksanaan jaringan intra pemerintah BPJPH 2 | Pelaksanaan jaringan intra pemerintah BPJPH 3 | Pelaksanaan jaringan intra pemerintah BPJPH 4 |  |
|     | 3) Monitoring dan evaluasi jaringan intra pemerintah pada BPJPH | Pusat Data dan Informasi |          | Monev jaringan intra pemerintah BPJPH 1         | Monev jaringan intra pemerintah BPJPH 2       | Monev jaringan intra pemerintah BPJPH 3       | Monev jaringan intra pemerintah BPJPH 4       |  |
|     | D. Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP)                |                          |          |                                                 |                                               |                                               |                                               |  |
|     | 1) Rencana pelaksanaan SPLP pada BPJPH                          | Pusat Data dan Informasi |          | 1 dokumen perencanaan pelaksanaan SPLP          | Tindak lanjut hasil tinjauan 1                | Tindak lanjut hasil tinjauan 2                | Tindak lanjut hasil tinjauan 3                |  |
|     | 2) Pelaksanaan Pengembangan SPLP pada BPJPH                     | Pusat Data dan Informasi |          | Pelaksanaan SPLP BPJPH 1                        | Pelaksanaan SPLP BPJPH 2                      | Pelaksanaan SPLP BPJPH 3                      | Pelaksanaan SPLP BPJPH 4                      |  |
|     | 3) Monitoring dan evaluasi SPLP pada BPJPH                      | Pusat Data dan Informasi |          | Monev SPLP BPJPH 1                              | Monev SPLP BPJPH 2                            | Monev SPLP BPJPH 3                            | Monev SPLP BPJPH 4                            |  |

| No. | Kegiatan                                                     | Unit Penanggung Jawab                                          | Baseline | Target                                             |                                                |                                                |                                                |  |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|     |                                                              |                                                                | 2025     | 2026                                               | 2027                                           | 2028                                           | 2029                                           |  |
| 6.  | Keamanan                                                     |                                                                |          |                                                    |                                                |                                                |                                                |  |
|     | A. Edukasi kesadaran keamanan informasi                      |                                                                |          |                                                    |                                                |                                                |                                                |  |
|     | 1) Perencanaan edukasi kesadaran keamanan informasi          | Pusat Data dan Informasi                                       |          | 1 dokumen perencanaan edukasi keamanan informasi   | Tindak lanjut hasil tinjauan 1                 | Tindak lanjut hasil tinjauan 2                 | Tindak lanjut hasil tinjauan 3                 |  |
|     | 2) Pelaksanaan edukasi kesadaran keamanan informasi          | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal    |          | Pelaksanaan edukasi keamanan informasi BPJPH 1     | Pelaksanaan edukasi keamanan informasi BPJPH 2 | Pelaksanaan edukasi keamanan informasi BPJPH 3 | Pelaksanaan edukasi keamanan informasi BPJPH 4 |  |
|     | 3) Evaluasi pelaksanaan edukasi kesadaran keamanan informasi | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal    |          | Evaluasi edukasi keamanan informasi BPJPH 1        | Evaluasi edukasi keamanan informasi BPJPH 2    | Evaluasi edukasi keamanan informasi BPJPH 3    | Evaluasi edukasi keamanan informasi BPJPH 4    |  |
|     | B. Penilaian Kerentanan Keamanan                             |                                                                |          |                                                    |                                                |                                                |                                                |  |
|     | 1) Perencanaan penilaian kerentanan keamanan informasi       | Pusat Data dan Informasi dan/atau Badan Sandi dan Siber Negara |          | 1 dokumen perencanaan penilaian keamanan informasi | tindak lanjut hasil tinjauan 1                 | Tindak lanjut hasil tinjauan 2                 | Tindak lanjut hasil tinjauan 3                 |  |
|     | 2) Pelaksanaan penilaian kerentanan keamanan                 | Pusat Data dan Informasi                                       |          | Pelaksanaan penilaian                              | Pelaksanaan penilaian                          | Pelaksanaan penilaian keamanan                 | Pelaksanaan penilaian keamanan informasi       |  |



| No. | Kegiatan                                                                             | Unit Penanggung Jawab                                                                    | Baseline | Target                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                      |                                                                                          | 2025     | 2026                                                                               | 2027                                                                             | 2028                                                                             | 2029                                                                             |  |
|     | 1) Perencanaan <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi          | Pusat Data dan Informasi dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal |          | 1 dokumen perencanaan <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi | Tindak lanjut hasil tinjauan 1                                                   | Tindak lanjut hasil tinjauan 2                                                   | Tindak lanjut hasil tinjauan 3                                                   |  |
|     | 2) Pelaksanaan <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi          | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal                              |          | Pelaksanaan <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi BPJPH 1   | Pelaksanaan <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi BPJPH 2 | Pelaksanaan <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi BPJPH 3 | Pelaksanaan <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi BPJPH 4 |  |
|     | 3) Evaluasi pelaksanaan <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi | Pusat Data dan Informasi dan/atau Badan Sandi dan Siber Negara                           |          | Evaluasi <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi BPJPH 1      | Evaluasi <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi BPJPH 2    | Evaluasi <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi BPJPH 3    | Evaluasi <i>workshop</i> dan pelatihan peningkatan keamanan informasi BPJPH 4    |  |
|     | E. Monitoring keamanan siber                                                         |                                                                                          |          |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |  |
|     | 1) Perencanaan pelaksanaan monitoring keamanan siber                                 | Pusat Data dan Informasi dan/atau Badan Sandi dan Siber Negara                           |          | 1 dokumen perencanaan pelaksanaan monitoring keamanan siber                        | Tindak lanjut hasil tinjauan 1                                                   | Tindak lanjut hasil tinjauan 2                                                   | Tindak lanjut hasil tinjauan 3                                                   |  |
|     | 2) Pelaksanaan monitoring keamanan siber                                             | Pusat Data dan Informasi                                                                 |          | Pelaksanaan monitoring                                                             | Pelaksanaan monitoring                                                           | Pelaksanaan monitoring keamanan                                                  | Pelaksanaan monitoring keamanan                                                  |  |



| No. | Kegiatan                                                        | Unit Penanggung Jawab | Baseline | Target                                                              |                                                                     |                                                                     |                                                                   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                 |                       | 2025     | 2026                                                                | 2027                                                                | 2028                                                                | 2029                                                              |  |
|     | A. Audit internal TIK                                           |                       |          |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                   |  |
|     | 1) Penyusunan petunjuk pelaksanaan audit internal TIK           | Inspektorat           |          | 1 dokumen petunjuk pelaksanaan audit internal TIK                   | Tindak lanjut hasil tinjauan 1                                      | Tindak lanjut hasil tinjauan 2                                      | Tindak lanjut hasil tinjauan 3                                    |  |
|     | 2) Surat edaran pelaksanaan audit TIK pada BPJPH                | Inspektorat           |          | Surat edaran pelaksanaan audit TIK 1                                | Surat edaran pelaksanaan audit TIK 2                                | Surat edaran pelaksanaan audit TIK 3                                | Surat edaran pelaksanaan audit TIK 4                              |  |
|     | 3) Evaluasi pelaksanaan edukasi kesadaran keamanan informasi    | Inspektorat           |          | Evaluasi edukasi keamanan informasi BPJPH 1                         | Evaluasi edukasi keamanan informasi BPJPH 2                         | Evaluasi edukasi keamanan informasi BPJPH 3                         | Evaluasi edukasi keamanan informasi BPJPH 4                       |  |
|     | 4) Pelaksanaan audit internal Aplikasi                          | Inspektorat           |          | Pelaksanaan audit internal Aplikasi BPJPH 1                         | Pelaksanaan audit internal Aplikasi BPJPH 2                         | Pelaksanaan audit internal Aplikasi BPJPH 3                         | Pelaksanaan audit internal Aplikasi BPJPH 4                       |  |
|     | 5) Pelaksanaan audit internal infrastruktur                     | Inspektorat           |          | Pelaksanaan audit internal infrastruktur BPJPH 1                    | Pelaksanaan audit internal infrastruktur BPJPH 2                    | Pelaksanaan audit internal infrastruktur BPJPH 3                    | Pelaksanaan audit internal infrastruktur BPJPH 4                  |  |
|     | 6) Tinjauan dan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal TIK | Inspektorat           |          | 1 dokumen atas hasil tinjauan atas evaluasi pelaksanaan audit TIK 1 | 1 dokumen atas hasil tinjauan atas evaluasi pelaksanaan audit TIK 2 | 1 dokumen atas hasil tinjauan atas evaluasi pelaksanaan audit TIK 3 | dokumen atas hasil tinjauan atas evaluasi pelaksanaan audit TIK 4 |  |
|     | B. Audit eksternal TIK                                          |                       |          |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                   |  |

| No. | Kegiatan                                                 | Unit Penanggung Jawab                            | Baseline | Target                                                    |                                                           |                                                           |                                                           |  |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|     |                                                          |                                                  | 2025     | 2026                                                      | 2027                                                      | 2028                                                      | 2029                                                      |  |
|     | 1) Perencanaan audit eksternal TIK                       | Inspektorat dan Badan Riset dan Inovasi Nasional |          | Perencanaan audit eksternal TIK 1                         | Perencanaan audit eksternal TIK 2                         | Perencanaan audit eksternal TIK 3                         | Perencanaan audit eksternal TIK 4                         |  |
|     | 2) Pelaksanaan Audit TIK eksternal pada BPJPH            | Inspektorat dan Badan Riset dan Inovasi Nasional |          | Pelaksanaan audit eksternal TIK 1                         | Pelaksanaan audit eksternal TIK 2                         | Pelaksanaan audit eksternal TIK 3                         | Pelaksanaan audit eksternal TIK 4                         |  |
|     | 3) Tinjauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal TIK | Inspektorat dan Badan Riset dan Inovasi Nasional |          | Tinjauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal TIK 1   | Tinjauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal TIK 2   | Tinjauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal TIK 3   | Tinjauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal TIK 4   |  |
|     | C. Audit Internal Keamanan TIK                           |                                                  |          |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |  |
|     | 1) Perencanaan audit internal keamanan TIK               | Inspektorat                                      |          | Perencanaan audit internal keamanan BPJPH 1               | Perencanaan audit internal keamanan BPJPH 2               | Perencanaan audit internal keamanan BPJPH 3               | Perencanaan audit internal keamanan BPJPH 4               |  |
|     | 2) Pelaksanaan audit internal keamanan aplikasi          | Inspektorat                                      |          | Pelaksanaan audit internal keamanan aplikasi BPJPH 1      | Pelaksanaan audit internal keamanan aplikasi BPJPH 2      | Pelaksanaan audit internal keamanan aplikasi BPJPH 3      | Pelaksanaan audit internal keamanan aplikasi BPJPH 4      |  |
|     | 3) Pelaksanaan audit internal keamanan infrastruktur     | Inspektorat                                      |          | Pelaksanaan audit internal keamanan infrastruktur BPJPH 1 | Pelaksanaan audit internal keamanan infrastruktur BPJPH 2 | Pelaksanaan audit internal keamanan infrastruktur BPJPH 3 | Pelaksanaan audit internal keamanan infrastruktur BPJPH 4 |  |
|     | 4) Tinjauan dan evaluasi audit                           | Inspektorat                                      |          | Tinjauan dan                                              | Tinjauan dan                                              | Tinjauan dan evaluasi                                     | Tinjauan dan evaluasi                                     |  |

| No.                             | Kegiatan                                                          | Unit Penanggung Jawab                        | Baseline | Target                                                                 |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                   |                                              | 2025     | 2026                                                                   | 2027                                                                   | 2028                                                                   | 2029                                                                   |
|                                 | internal keamanan                                                 |                                              |          | evaluasi pelaksanaan audit keamanan internal TIK 1                     | evaluasi pelaksanaan audit keamanan internal TIK 2                     | pelaksanaan audit keamanan internal TIK 3                              | pelaksanaan audit keamanan internal TIK 4                              |
| D. Audit eksternal keamanan TIK |                                                                   |                                              |          |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
|                                 | 1) Perencanaan audit eksternal keamanan TIK                       | Inspektorat dan Badan Sandi dan Siber Negara |          | Perencanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 1                       | Perencanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 2                       | Perencanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 3                       | Perencanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 4                       |
|                                 | 2) Pelaksanaan audit eksternal keamanan TIK pada BPJPH            | Inspektorat dan Badan Sandi dan Siber Negara |          | Pelaksanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 1                       | Pelaksanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 2                       | Pelaksanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 3                       | Pelaksanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 4                       |
|                                 | 3) Tinjauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal keamanan TIK | Inspektorat dan Badan Sandi dan Siber Negara |          | Tinjauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 1 | Tinjauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 2 | Tinjauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 3 | Tinjauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal keamanan TIK BPJPH 4 |

KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia  
dan Hubungan Masyarakat,

  
Beny Cahyadi  
NIP. 198204102000121001